

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

# Belum Izinkan Warga Huni Kampung Bayam

**P**T Jakarta Propertindo atau Jakpro (Perseroan) menegaskan, perseroan belum memberikan izin Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) untuk menempati Kampung Susun Bayam, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Hingga kini, Jakpro bersama stakeholder terkait sedang berupaya mencari konsep pengelolaan yang matang dan secara legal formal tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Direktur Utama PT Jakpro Iwan Takwin, mengatakan kerja sama seluruh pihak diperlukan demi menjaga suasana yang kondusif dan tidak memaksakan kehendak tanpa adanya keputusan dari pihak yang berwenang.

Jika menilik ke belakang, secara histori warga Kampung Bayam merupakan penggarap lahan milik Pemprov DKI Jakarta dan tidak memiliki hak atas tanah yang ditempatinya tersebut.

"Meski demikian, seluruh masyarakat Kampung Bayam sejumlah 642 Kepala Keluarga (KK) ini sudah mendapatkan biaya kompensasi atas penggantian hunian mereka di Kampung Bayam," kata Iwan dari keterangannya pada Senin (18/12/2023).



Iwan mengatakan, dalam konteks hukum tersebut, Jakpro sudah menunaikan kewajibannya. Terlebih penggantian ganti untung juga merupakan hasil musyawarah secara berkelanjutan dengan kelompok-kelompok warga eks Kampung Bayam.

"Jakpro menegaskan tidak mentolerir tindakan-tindakan di luar batasan yang berlebihan, seperti perilaku memasuki pekarangan secara ilegal dan memaksakan diri memasuki area yang sudah dikunci," tegas Iwan.

Menurutnya, perseroan tengah melakukan investigasi dan koordinasi dengan pihak berwenang terkait atas adanya potensi pelanggaran aturan yang terjadi. Dia mengimbau kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk masuk ke area tersebut.

"Jakpro juga menambah personel pengamanan untuk memastikan hal yang serupa tidak terjadi lagi," ujar Iwan.

Sementara itu warga eks Kampung Bayam, Furqon menuntut kontrak sosial dengan Gubernur

DKI Jakarta sebelumnya, yakni Anies Baswedan.

Diketahui, warga sudah dijanjikan untuk bisa mengisi hunian tersebut. (faf)

Disk Warta Kota